

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, & S. (2020). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 22–35.
- Aloysius Uwiyono Dkk. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Alydrus, S. M. Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 362–377.
- Ananda. (2023). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved July 9, 2023, from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, Z. (2015). *Hukum Kerja*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Bennaris Kaban. (2021). *Ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan perspektif politik hukum pidana*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205–244.
- Chythia Dewi Kartika. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pt Inti Indosawit Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Perpustakaan Universitas Islam Riau*.
- Danan Tricahyono. (2020). Buruh Dalam Sejarah Indonesia : Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942 Laborer In Indonesian History : Study Of Labor Activities During The Dutch Colonial Rule Of The Period, 16(2).
- Daud Silalahi & Lawencon Associates. (2022). Juni 0 Comments Share UU Ketenagakerjaan: Sejarah & Perkembangannya di indonesia. Retrieved from <https://www.dslalawfirm.com/id/sejarah-undang-undang-ketenagakerjaan/>
- Djumadi. (2006). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahrojih, I. (2016). *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional*. Malang: Intrans Publishing.
- Falentino Tampongangoy. (2013). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Gatiningsih & Eko Sutrisno. (2017). *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685-6077), 56–65.
- Hiariej, E. O. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Jaang, S. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 349–357.
- Kristina, M. (2021). Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam. *Yustika*, 24(01).
- Marlina, H. (2018). Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional. *Varia Hukum*, (17), 229–238.
- Marwiyatun. (2018). Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Memberikan Gaji Di Bawah Upah Minimum Provinsi Kepada Karyawan Di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XV(1).
- Megawati Soekarnoputri. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2003).
- Muhammad Hafidz Habibie. (2017). *Analisis yuridis mens rea (sikap batin jahat) dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara*. Semarang.
- Nurbani, H. S. H. . dan E. . (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Padrisan Jamba &, R. T. A. B. (2022). Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Oleh Konsumen Pengguna Jasa Perbaikan Kapal. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(1), 55. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jck.v10i1>
- Priyatno Dwidja. (2004). *Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco.
- Purbadi Hardjoprajitno, dkk. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Ratna, D., Hariyanto, S., Gede, I. D., & Sugama, D. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Udayana Master Law Journal*, 10(2), 404–415. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15>
- Ratnaningsih. (2021). Menakar nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pencegahan perkawinan anak. *Journal Economic & Business Law Review*, 1(1), 50–66.
- Sekedang, E. (2018). Modus Pengangkatan Anak Yang Berimplikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1).
- Sudawan, M. Y. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja / Buruh Atas Pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum*. Kekhususan Hukum Ekonomi. UNIVERSITAS INDONESIA.
- Suhartoyo. (2020). Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3). <https://doi.org/ISSN.2621-2781>
- Suryani, R. (2018). Analisis Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Pt.Latinusa Terhadap

- Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *1*(1), 150–172.
- Thamrin S. (2017). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Implementation Of Minimum Wages In National System Wages To Improve Work Force ' S Welfare. *Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI*, 11–20.
- Wahyuni, F. (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. (M Rizqi Azmi, Ed.) (1st ed.). Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang Undangan

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Yang Sebagaimana Sebagai Penggati Dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016.
11. Putusan Pengadilan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby